



Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Study on Handling Slum Settlement Areas in South Senga Village, Belopa District, Luwu Regency

Esse Syam¹ Syafri², Syamsuddin Margolang¹

¹ Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar

² Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa,

essesyam1@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima; 10-07-2023

Direvisi; 28-04-2024

Disetujui; 11-07-2024

Abstract. *Slums area settlements that are unfit for habitation because of the irregularity of the buildings, the high level of building density, and the quality of the buildings and facilities and infrastructure that do not meet the requirements. Luwu Regency is one of the areas that has a slum location located in Senga Selatan Village. In the context of handling slum areas, identification is carried out to determine the level of slums, the determinant factors that affect the level of slums and the handling of slum areas. Identification is carried out using an analysis of the level of slums based on the 2018 PUPR Ministerial Regulation. The implementation is carried out based on survey data results, an analysis of the calculation of the slum level scoring assessment, and range values. From the results of the analysis it is known that Senga Selatan Village is included in mild slums, the determinant factors that cause slums are from the aspect of building conditions, environmental drainage conditions, and fire protection conditions.*

Abstrak. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kabupaten Luwu merupakan salah satu kawasan yang memiliki lokasi permukiman kumuh yang terletak di Desa Senga Selatan. Dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh maka dilakukan identifikasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan, factor-faktor determinan yang mempengaruhi tingkat kekumuhan serta penanganan kawasan permukiman kumuh. identifikasi dilakukan dengan menggunakan analisis tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Tahun 2018. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil data survei, analisis perhitungan penilaian skoring tingkat kekumuhan, dan nilai rentang. Dari hasil analisis diketahui Desa Senga Selatan termasuk dalam kumuh ringan, factor determinan yang menyebabkan kekumuhan yaitu dari aspek kondisi bangunan, kondisi drainase lingkungan, dan kondisi proteksi kebakaran.

Keywords:

Permukiman;

Permukiman Kumuh;

Kumuh Ringan;

Pemugaran

Corresponden author:

Email: essesyam1@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 956 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Desa Senga Selatan merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang terletak di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Masalah permukiman kumuh khususnya yang berada di kawasan pesisir merupakan masalah yang harus ditangani dengan solusi yang komperatif karena hal ini berkaitan dengan aspek fisik, ekonomi, social, budaya, dan psikologis masyarakat serta penanganannya harus mempertimbangkan status mata pencarian masyarakat setempat yang didominasi oleh nelayan yang menuntut lokasi tempat tinggal berdekatan dengan tempat mata pencarian (Jabir., dkk, 2022; Magfirah., dkk, 2023).

Untuk mengetahui permasalahan kekumuhan yang terjadi di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu perlu dilakukan identifikasi kondisi kekumuhan yang bertujuan agar dapat menentukan tingkat kekumuhan, factor determinan penyebab kekumuhan, dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh. Dalam menentukan perhitungan tingkat kekumuhan perlu dilakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) indicator kriteria permukiman kumuh, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Analisis

Metode analisis yaitu metode untuk menganalisis atau mengolah data-data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang dilakukan. Berikut adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini;

a) Analisa deskriptif

Analisa ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul di wilayah penelitian.

b) Analisis Kuantitatif

Yang termasuk dalam analisis kuantitatif dalam penelitian ini yaitu analisis identifikasi kawasan permukiman kumuh di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan penentuan prioritas penanganan.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang merupakan salah satu kawasan dengan klasifikasi kumuh berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 956 tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu terhitung dari bulan maret 2023 hingga mei 2023.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan suatu Teknik pengumpulan data diantaranya Observasi lapangan merupakan pengamatan keadaan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, Wawancara dilakukan untuk mendengarkan tanggapan atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dari masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal di daerah tersebut, Kuesioner dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada masyarakat di tempat penelitian yang dijadikan responden untuk

dijawab, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada pada tempat penelitian.

2.4 Populasi Dan Sampel

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 400 kepala keluarga di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Teknik sampling menurut Sugiyono, (2016) ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Non-probability Sampling dengan metode purposive sampling dimana teknik dalam pengambilan sampel ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden. Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan rumus slovin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya. Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10%. Rumus slovin:

$$n = N / (1+(N \times e^2))$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran tingkat ketelitian

Berdasarkan rumus Slovin, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian adalah:

$$n = 400 / (1+(400 \times 0,1^2))$$

$$n = 400 / (1+4)$$

$$n = 400 / 5$$

$$n = 80$$

Maka besar sampel pada penelitian ini sebanyak 80 kepala keluarga di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa kabupaten Luwu.

2.5 Variabel Penelitian

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
1	2	3	4	5
1	Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu	Kualitas Bangunan	Izin mendirikan bangunan	Ketidakteraturan, kepadatan dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan didirikan.
		Jaringan Jalan Lingkungan	Penyediaan system jaringan jalan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh permukiman serta kualitasnya yang buruk.
		Penyediaan Air Minum	Pemenuhan penyediaan air minum	Tidak tersedianya akses air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum sesuai standar yang berlaku.
		Sistem Jaringan Drainase	Penyediaan system jaringan drainase	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. Tidak tersedianya drainase Kualitas konstruksi drainase yang buruk
		Sistem Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
		Kualitas Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sistem Jaringan Persampahan	Pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
2	Mengidentifikasi factor determinan yang mempengaruhi tingkat kekumuhan di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu	Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Ketidakterediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
		Kondisi fisik bangunan	Kepemilikan lahan bangunan Ketersediaan rumah Kualitas bangunan Kepadatan bangunan	Status legaligas lahan
		Kondisi sarana dan prasarana	Kualitas sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana	Tingkat pelayanan dan besaran ketersediaan sarana dan prasarana

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
1	2	3	4	5
		Kondisi sosial ekonomi masyarakat	Tingkat arus migrasi Tingkat pendidikan Kepadatan penduduk Pendapatan penghasilan penduduk	Penggolongan kelas sosial serta tingkat kedudukan ekonomi masyarakat.
		Pengendalian hukum	Pengawasan tanah yang kurang ketat	Luas lahan wilayah tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan
3	Menentukan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu	Sesuai Output Sasaran 2	Sesuai Output Sasaran 2	Penanganan kawasan permukiman kumuh dari data analisis

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

2.6 Definisi Operasional

- 1) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 2) Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 4) Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- 5) Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 6) Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 7) Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- 8) Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
- 9) Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
- 10) Analisis tingkat kekumuhan yaitu analisis yang digunakan untuk mengelompokkan kriteria berdasarkan nilai sesuai tingkatannya guna menghitung tingkat kekumuhan berdasarkan karakteristik persebaran permukiman kumuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 20° 34'45'' – 30° 30'30'' Lintang Selatan (LS) Dan 120° 21'15'' - 121° 43'11'' Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 Km dari Kota Makassar. Ibu kota Kabupaten luwu adalah Kecamatan Belopa. Berdasarkan posisi letak geografisnya, Kabupaten Luwu berbatasan dengan;

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo.
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

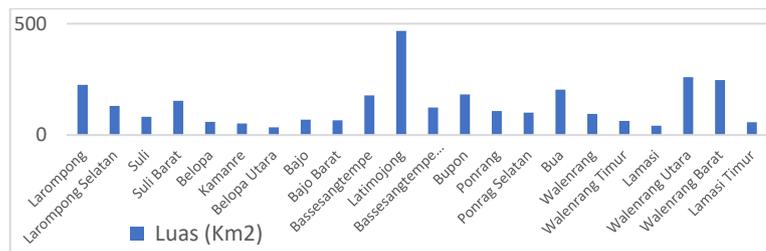
Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu yaitu 3.000,25 Km² yang terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas sekitar 467,75 Km² atau sekitar 15,59 % dari luas Kabupaten Luwu. Sedangkan wilayah yang memiliki

luas terkecil adalah Kecamatan Belopa dengan luas sekitar 34,73 Km² atau sekitar 1,16 % dari luas Kabupaten Luwu.

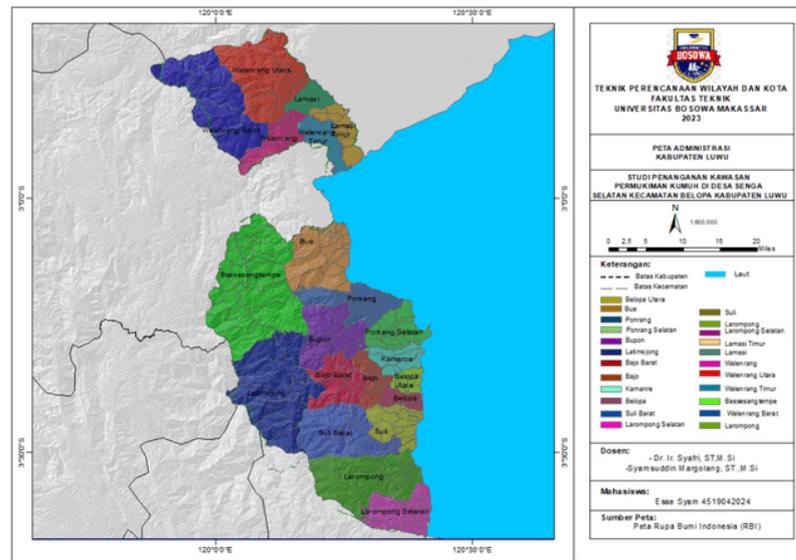
Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
1	2	3	4
1.	Larompong	Larompong	225,25
2.	Larompong Selatan	Bonepute	131,00
3.	Suli	Suli	81,75
4.	Suli Barat	Lindajang	153,50
5.	Belopa	Tanamanai	59,26
6.	Kamanre	Cilallang	52,44
7.	Belopa Utara	Pammanu	34,73
8.	Bajo	Bajo	68,532
9.	Bajo Barat	Bonelemo	66,33
10.	Bassesangtempe	Lissaga	178,12
11.	Latimojong	Pajang	467,75
12.	Bassesangtempe Utara	Pantilang	122,88
13.	Bupon	Noling	182,67
14.	Ponrang	Padang Sappa	107,09
15.	Ponrag Selatan	Pattedong	99,98
16.	Bua	Bua	204,01
17.	Walenrang	Batusitanduk	94,60
18.	Walenrang Timur	Taba	63,65
19.	Lamasi	Lamasi	42,20
20.	Walenrang Utara	Bosso	259,77
21.	Walenrang Barat	Ilang Batu	247,13
22.	Lamasi Timur	To' Lemo	57,65
Kabupaten Luwu		Belopa	3.000,65

Sumber: BPS Kab. Luwu 2023



Gambar 2. Diagram Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Tahun 2023



Gambar 3. Peta Kabupaten Luwu

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Belopa

Kecamatan Belopa merupakan salah satu dari 22 Kecamatan di Kabupaten Luwu. Wilayah administrasi Kecamatan Belopa terdiri dari 9 Desa, 38 Dusun/Lingkungan, 16 RW dan 24 RT dengan luas wilayah 59,26 km². Adapun batas administrasi Kecamatan Belopa yaitu sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kecamatan Belopa Utara
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kecamatan Suli
- Sebelah Barat : Kecamatan Bajo

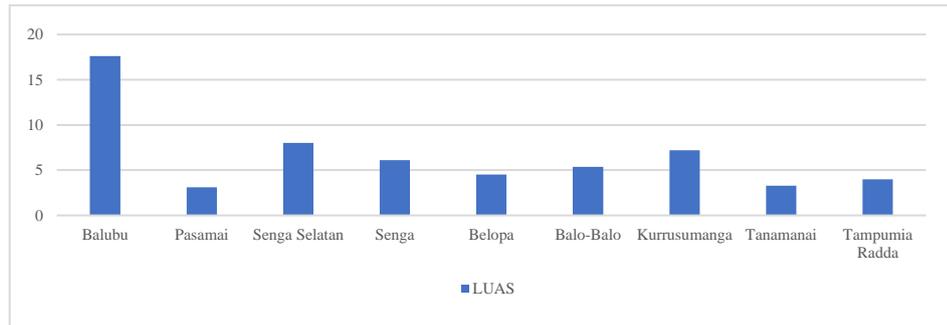
Adapun luas dan pembagian administrasi Kecamatan Belopa seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Luas Desa Di Kecamatan Belopa, 2023

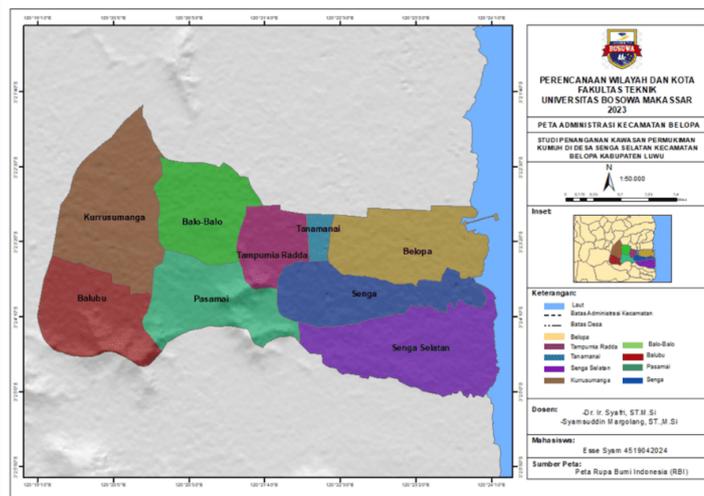
No.	Desa	Luas Wilayah	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1	2	3	4
1	Balubu	17,61	29,72
2	Pasamai	3,12	5,26
3	Senga Selatan	8,00	13,50
4	Senga	6,11	10,31
5	Belopa	4,54	7,66
6	Balo-Balo	5,38	9,08
7	Kursumanga	7,20	12,15
8	Tanamanai	3,30	5,57
9	Tampumia Radda	4,00	6,25
Jumlah		59,26	100

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2022

Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Desa terluas yang ada di Kecamatan Belopa yaitu Desa Balubu dengan luas 17,61 km² atau 29,72% dari luas keseluruhan Kecamatan Belopa. Sedangkan untuk Desa dengan luas paling kecil yaitu Desa Pasamai dengan luas 3,12 km² atau 5,26% dari luas Kecamatan Belopa untuk lebih jelasnya pada gambar berikut.



Gambar 4. Diagram Luas Desa Di Kecamatan Belopa Tahun 2023



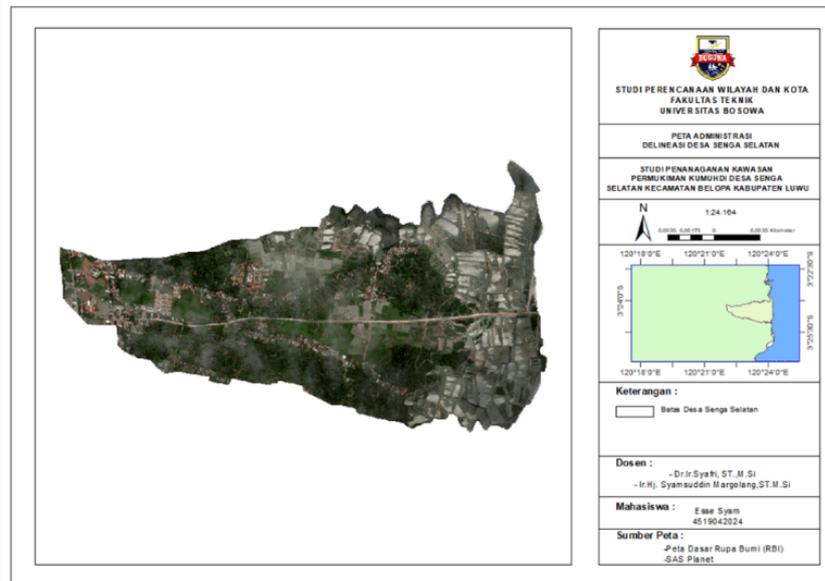
Gambar 5. Peta Kecamatan Belopa

Kecamatan Belopa merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, perkembangan penduduk di Kecamatan Belopa selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berdasarkan buku Kecamatan Belopa dalam angka 2022 jumlah penduduk pada tahun 2021 yaitu 19.277 jiwa seperti pada tabel berikut.

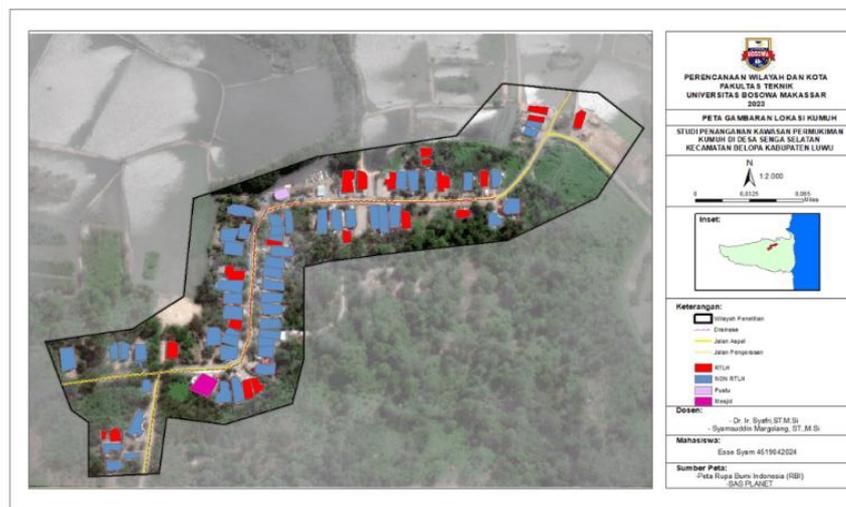
3.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, lebih tepatnya berada di Dusun Tadette. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan kawasan yang menjadi lokasi permukiman kumuh berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 956 Tahun 2020 tentang penerapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi Desa Senga Selatan memiliki luas 800 Ha yang memiliki 6 Dusun/Lingkungan, 6 RW, dan 12 RT, dengan letak geografis $3^{\circ} 42' 1,968''$ LS $120^{\circ} 38' 4,025''$ BT. Sedangkan lokasi penelitian pada Dusun Tadette mempunyai luas 8 Ha. Berikut adalah batasan dari Desa Senga Selatan.

- Sebelah Utara : Kelurahan Senga
- Sebelah Barat :Desa Pasamai
- Sebelah Selatan :Desa Kasiwang
- Sebelah Timur :Teluk Bone



Gambar 6. Peta Desa Senga Selatan



Gambar 7. Peta Lokasi Penelitian

3.4 Analisis Tingkat Kekumuhan

Untuk menjawab penyebab tingkat kekumuhan di Desa senga Selatan menggunakan analisis tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang panduan penyusunan rencana pencegaham dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPK).

1) Kondisi Bangunan Gedung

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan, kondisi bangunan gedung di kawasan Tadette memiliki kepadatan bangunan sedang, serta pembangunan rumah penduduk tidak sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Untuk keteraturan bangunan, sebagian rumah di Dusun Tadette mengikuti alur jalan, sehingga memiliki keteraturan baik.

Tabel 4. Kondisi Bangunan

Kriteria	Jumlah (Unit)
<i>1</i>	<i>2</i>
Jumlah bangunan	70
Kepadatan bangunan (Unit/Ha)	8
Bangunan hunian layak huni	50
Bangunan hunian tidak layak huni	20

Sumber : Analisis Tahun 2023



Gambar 8. Kondisi Bangunan

a. Ketidakteraturan Bangunan

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Tidak Teratur (Unit)}}{\text{Jumlah Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$$

$$\frac{48}{70} \times 100\% = 25\%$$

b. Tingkat Kepadatan Bangunan

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan}}{\text{Luas Kawasan Kumuh (Ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{70}{78} \times 100\% = 87\%$$

c. Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis

$$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak sesuai teknis (Unit)}}{\text{jumlah bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$$

$$\frac{34}{70} \times 100\% = 48\%$$

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Jaringan jalan yang merupakan penghubung antar wilayah atau kawasan, harus sesuai dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi di lapangan masih belum memenuhi standar teknis sesuai badan jalan. Kondisi jalan lingkungan Di Dusun Tadette belum sepenuhnya baik dikarenakan masih ada jalan yang kurang layak seperti jalan pengerasan apabila musim hujan menjadi becek sehingga membutuhkan perbaikan.

Tabel 5. Kondisi Jalan

Kriteria	Panjang (Meter)
1	2
Jaringan Jalan	873
Jangkauan jaringan jalan layak	661
Jangkauan jaringan kurang layak	212

Sumber : Analisis Tahun 2023



Gambar 9. Kondisi Jalan

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan permukiman

$$\frac{\text{Total Panjang Jalan Yang Rusak (M)}}{\text{Panjang Jalan (M)}} \times 100\%$$

$$\frac{212}{873} \times 100\% = 25\%$$

- b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Yang Buruk

$$\frac{\text{Luas Kawasan Dengan Jalan Rusak}}{\text{Luas Kawasan Keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{212}{873} \times 100\% = 25\%$$

3) Kondisi Penyedia Air Minum

Air bersih merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Mayoritas masyarakat mengakses air minum sumur bor, sumur galian, dan PAMSIMAS (Bantuan Desa). Berdasarkan hasil survey di lapangan, kondisi penyediaan air minum belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas dikarenakan sumur bor yang digunakan airnya berasa dan PAMSIMAS juga tidak selalu lancar mengaliri air ke setiap rumah.



Gambar 10. Kondisi Sumber Air Bersih

- a. Akses aman air minum tidak tersedia

$$\frac{\text{jumlah KK tidak Terakses air minum berkualitas}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{22}{70} \times 100\% = 31\%$$

- b. Kebutuhan air minum minimal

$$\frac{\text{jumlah kk tidak terakses air minum cukup}}{\text{jumlah kk keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{25}{70} \times 100\% = 35\%$$

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi system jaringan drainase di lokasi penelitian merupakan system jaringan drainase terbuka yang mengikuti pola jaringan jalan. Kondisi drainase sangat buruk dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena tidak dapat mengalirkan air limpasan saat musim hujan yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk. Serta sepanjang jalan masih ada yang tidak dilengkapi dengan drainase.

a. Ketidakterediaan Drainase

$$\frac{\text{Total Panjang Drainase (M)}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100\%$$

$$\frac{661}{875} \times 100\% = 76\%$$

b. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air

$$\frac{\text{luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$$

c. Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk

$$\frac{\text{panjang drainase yang buruk (m)}}{\text{total panjang drainase (m)}} \times 100\%$$

$$\frac{381}{661} \times 100\% = 57\%$$

5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan hasil observasi lapangan pengelolaan air limbah di lokasi penelitian kurang baik dikarenakan masih adanya rumah tangga yang yang tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis seperti membuang langsung limbah rumah tangga ke halaman rumah.



Gambar 11. Kondisi Air Limbah

a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

$$\frac{\text{luas kawasan dengan drainase tidak terpelihara}}{\text{luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{381}{8} \times 100\% = 47\%$$

b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

$$\frac{\text{jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{22}{70} \times 100\% = 25\%$$

6) Kondisi Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil observasi lapangan kondisi system jaringan persampahan di lokasi penelitian tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena masyarakat cenderung membuang sampah di pekarangan rumah atau tanah kosong dan kemudian membakar sampah. Hal tersebut disebabkan belum adanya system jaringan persampahan seperti motor/mobil sampah masuk ke lokasi penelitian yang mengharuskan masyarakat membakar sampahnya.



Gambar 12. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

$$\frac{\text{luas kawasan dengan sarpras pengelolaan sampah tidak sesuai teknis}}{\text{luas kawasan keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{3,34}{8} \times 100\% = 42\%$$

- b. System pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

$$\frac{\text{jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$$

7) Kondisi Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi di lapangan lokasi penelitian belum mempunyai hydran kebakaran. Pada lokasi penelitian pemerintah belum memiliki upaya dalam pencegahan dan antisipasi pada kebakaran dan hanya menggunakan damkar yang jaraknya jauh dari lokasi penelitian.

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
Sebagian besar area memiliki pasokan air untuk pemadaman yang tidak memadai serta pasokan air damkar tidak memadai di 60% luas area penelitian. (Nilai Bobot 3).
- b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
Pada lokasi penelitian belum tersedianya sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran khusus di lokasi Penelitian (Nilai Bobot 5).

Tabel 6. Analisis Pembobotan Kawasan Permukiman Kumuh

Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	
1	2	3	4	
Identifikasi Kondisi Kekumuhan				
1. Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan	51% - 75% Bangunan Pada Lokasi Tidak Memiliki Keteraturan	1	
	• Tingkat Kepadatan Bangunan	25% - 50% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	5	
	• Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Bangunan	76% - 100% Bangunan Pada Lokasi Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	1	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	• Jaringan Lingkungan Melayani	Jalan Tidak Seluruh	25% - 50% Area Tidak Terlayani Oleh Jaringan Jalan Lingkungan	1

Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai
1	2	3	4
	Lingkungan Perumahan Atau Permukiman		
	• Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Yang Buruk	25% - 50% Area Memiliki Kualitas Permukaan Jalan Yang Buruk	1
3.	Kondisi Penyedia Air Minum	• Akses Aman Air Minum Tidak Tersedia	25% - 50% Populasi Tidak Dapat Mengakses Air Minum Yang Aman
	• Kebutuhan Air Minum Minimal Setiap Individu Tidak Terpenuhi	25% - 50% Populasi Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya	1
	• Drainase Lingkungan Tidak Tersedia	• 51% - 75% Area Tidak Tersedia Drainase Lingkungan Dan/Atau Tidak Terhubung Dengan Hirarki Di Atasnya	3
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	• Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan	• 25% - 50% Area Terjadi Genangan > 30cm, > 2 Jam Dan > 2 X Setahun
	• Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk	51% - 75% Area Memiliki Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk	3
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	25% - 50% Area Memiliki Sistem Air Limbah Yang Tidak Sesuai Standar Teknis
	• Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	25% - 50% Area Memiliki Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis.	1
	• Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Memenuhi Dengan Persyaratan Teknis	51% - 75% Area Memiliki Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	3
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	• Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	25% - 50% Area Memiliki Sistem Persampahan Tidak Sesuai Standar
	• Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia	76% - 100% Area Tidak Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran	3
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Sarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia	76% - 100% Area Tidak Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran
			5
			32
			Identifikasi Legalitas Lahan
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Keseluruhan Lokasi Memiliki Kejelasan Status Penguasaan Lahan, Baik Milik Sendiri Atau Milik Pihak Lain	(+)
	Kesesuaian Rtr	Sebagian Atau Keseluruhan Lokasi Berada Bukan Pada Zona Peruntukan Perumahan/Permukiman Sesuai Rtr	(-)
			Identifikasi Pertimbangan Lain
	• Nilai Strategis Lokasi	Lokasi Tidak Terletak Pada Fungsi Strategis Kabupaten/Kota	1
	• Kependudukan	Kepadatan Penduduk Pada Lokasi Sebesar	1
	• Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya	Lokasi Memiliki Potensi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Untuk Dikembangkan Atau Dipelihara	5
			7

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7. Formula Penelitian

1.	Tingkat kekumuhan	= Total Nilai A
2.	Legalitas lahan	= Total Nilai B
3.	Pertimbangan lain	= Total Nilai C

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 8. Penjabaran Formula Penelitian

Nilai	Keterangan
1	2
Tingkat Kekumuhan	
60-80	Kumuh Berat
38-59	Kumuh Sedang
16-37	Kumuh Ringan
Legalitas Lahan (B)	
(+)	Status lahan legal
(-)	Status Lahan Tidak Legal
Pertimbangan Lain (C)	
11-15	Pertimbangan Lain Rendah
6-10	Pertimbangan Lain Sedang
1-5	Pertimbangan Lain Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 9. Hasil Formula Penelitian (Skoring) Kawasan Kumuh

Nilai	keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																					
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	C		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	
Kondisi Kekumuhan (Total Nilai A)																							
16-37	Kumuh Ringan	1	5	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	3	1	3	5						
Legalitas Lahan (Total Nilai B)																							
(+)	Status lahan Legal																		(+)	(+)			
Pertimbangan Lain (Total Nilai C)																							
6-10	Pertimbangan lain sedang																			1	1	5	
										32										(+)		7	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel penilaian di wilayah penelitian tingkat kekumuhannya termasuk kumuh ringan dengan bobot penilaian tingkat kekumuhan 32, legalitas lahan hasilnya (-) tidak legal, dan pertimbangan Lainnya 7 termasuk pertimbangan lain sedang.

3.5 Penentuan Faktor-faktor Determinan Yang Menyebabkan Kekumuhan

Untuk mengklasifikasikan hasil penilaian berdasarkan kategori maka dilakukan perhitungan terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan rumus menentukan nilai rentang:

$$\text{Nilai Rentang (NR)} = \frac{\Sigma \text{nilai tertinggi} - \Sigma \text{nilai terendah}}{2}$$

$$\text{Nilai Rentang (NR)} = \frac{10 - 2}{2} = 4$$

Maka klasifikasi digunakan dalam menentukan factor-faktoor determinan penyebab tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian (Ruslan., dkk, 2021), seperti berikut:

- a. Bukan factor determinan penyebab kekumuhan jika nilai rentang 1-4
- b. Factor determinan penyebab kekumuhan jika memiliki rentan 5-10

Tabel 10. Pembobotan Faktor Determinan Penyebab Kekumuhan

No.	Aspek	Total Bobot	Klasifikasi
1	2	3	4
1.	Kondisi bangunan	7	Factor determinan penyebab kekumuhan
2.	Kondisi jalan lingkungan	2	Bukan factor determinan penyebab kekumuhan
3.	Kondisi penyedia air minum	2	Bukan factor determinan penyebab kekumuhan
4.	Kondisi drainase lingkungan	7	Factor determinan penyebab kekumuhan
5.	Kondisi pengelolaan air limbah	2	Bukan factor determinan penyebab kekumuhan
6.	Kondisi pengelolaan persampahan	4	Bukan factor determinan penyebab kekumuhan
7.	Kondisi proteksi kebakaran	8	Factor determinan penyebab kekumuhan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil klasifikasi pembobotan (Skoring), menunjukkan bahwa factor determinan penyebab kekumuhan terdapat 3 (tiga) factor yaitu kondisi bangunan, kondisi drainase lingkungan, dan kondisi proteksi kebakaran. Ketiga factor tersebut menjadi factor-faktor determinan penyebab tingkat kekumuhan di Dusun Tadette karena memiliki nilai rentang 5-10. Masing-masing memiliki bobot yakni 8 untuk kondisi bangunan, 7 kondisi drainase, dan 10 untuk kondisi proteksi kebakaran.

3.6 Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil analisis tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu termasuk kedalam kategori kumuh ringan dan legal. Dimana sesuai dengan rumusan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pola penanganan yaitu pemugaran. Adapun pemugaran yang dimaksud sesuai dengan factor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian yaitu:

- a. Rehabilitasi bangunan agar fungsi, massa bangunan dan material bangunan sesuai kondisi yang layak.
- b. Meningkatkan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan agar dapat berfungsi dengan baik.
- c. Peningkatan dan penambahan unit proteksi kebakaran pada lokasi penelitain agar dapat terjangkau dengan mudah sehingga memiliki fungsi dan membantu masyarakat saat dibutuhkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penilaian (Skoring) di wilayah penelitian tingkat kekumuhannya termasuk kumuh ringan dengan bobot penilaian tingkat kekumuhan 32, legalitas lahan hasilnya (-) tidak legal, dan pertimbangan Lainnya dengan bobot 7 termasuk pertimbangan lain sedang. Berdasarkan analisis skoring (pembobotan) dan nilai rentang terdapat factor determinan yang mempengaruhi tingkat kekumuhan di Desa Senga Selatan antara lain: (a) aspek kondisi bangunan, (b) aspek kondisi drainase lingkungan, dan (c) aspek kondisi proteksi kebakaran. Serta Berdasarkan hasil analisis tingkat kekumuhan dilakukan pola penanganan yaitu pemugaran. Adapun pemugaran yang dimaksud sesuai dengan factor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian yaitu: (a) Rehabilitasi bangunan agar fungsi, massa bangunan dan material bangunan sesuai kondisi yang layak, (b) Meningkatkan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan agar dapat berfungsi dengan baik, dan (c) Peningkatan dan penambahan unit proteksi kebakaran pada lokasi penelitain agar dapat terjangkau dengan mudah sehingga memiliki fungsi dan membantu masyarakat saat dibutuhkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2023. Kabupaten Luwu.
 Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)*. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Jabir, B. I., Latief, R., & Taking, I. (2022). Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh: Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. *Journal of Urban Planning Studies*, 3(1), 19-29.
- Magfirah, A., Syafri, S., & Ruslan, R. (2023). Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 129-139.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018
- Ruslan, R., Widodo, K. E., & Latief, R. (2021). Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 055-065.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 956 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.